SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK

Mirza Shahreza

mirzashahreza@gmail.com

"Now as in the past it is difficult to separate the quality and cast of political life from the methods of communication that sustain it. But behind the changes wrought by technology, organization, and the scale of politics, there is also a certain sameness. Linked to the communication structures which characterize a society, and in fact inseparable from them, are numerous face-to-face relationships. Much of the political business of the world is still done in such situations, and it would indeed provide a mistaken view of the communication process to concentrate on machines and organizations to the exclusion of the face-to-face groupings which are a prominent feature of all political systems" (Richard R. Fagen, 1966).¹

A. Sifat dari Aspek Politik

Apakah yang membedakan aspek politik dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat? Apakah karakteristik-karakteristik dari suatu sistem politik yang membedakan dari sistem ekonomi? Walaupun ahli-ahli politik tidak pernah seluruhnya setuju mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka cenderung untuk menyetujui beberapa masalah pokok. Mungkin tidak seorangpun yang akan berselisih mengenai ide bahwa suatu sistem politik adalah suatu pola hubungan politik. Tetapi, apakah yang disebut hubungan politik?²

Jawaban atas pertanyaan ini, seperti juga atas banyak pertanyaan lain, walaupun tidak seluruhnya selalu jelas, dapat dijumpai pertama kali dalam karangan Aristoteles, *Politics* (ditulis antara tahun 335-332 S.M). Di dalam *Politics* buku pertama, Aristoteles berbeda pendapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa semua jenis kewenangan adalah identik dan mencoba membedakan kewenangan pemimpin politik di dalam suatu asosiasi politik, atau polis, dari bentuk-bentuk kewenangan yang lain, seperti antara majikan dengan budaknya, antara suami terhadap istrinya, dan antara orang tua terhadap anaknya.

Tetapi Aristoteles berpendapat bahwa di dalam asosiasi politik sekurang-kurangnya terdapat aspek yaitu wewenang (*authority*) atau aturan (*rule*). Sebenarnya, Aristoteles mendefinisikan polis atau asosiasi politik

¹ Richard R. Fagen, 1966. *Politics and Communication*. Boston: Little, Brown, p. 3. In <http://www.arachnis.com/kerryo/ott.htm>

² Diskusi singkat mengenai pandangan masa kini atas skope ilmu politik, lihat Oran R. Young, *System of Political Sciences*, Bab I.

sebagai “asosiasi yang mempunyai kedaulatan tertinggi dan mencakup semua”, dan mendefinisikan suatu konstitusi atau *polity* sebagai “organisasi dari suatu polis dalam hubungannya dengan jabatan-jabatan yang umum, tetapi terutama dalam hubungannya dengan jabatan khususnya yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam semua masalah.”³ Salah satu dari kriteria Aristoteles mengenai klasifikasi konstitusi-konstitusi adalah porsi penduduk di mana terletak wewenang atau aturan yang terakhir.

Sejak masa Aristoteles, telah di sebarluaskan pengertian bahwa suatu hubungan politik sedikit banyak melibatkan wewenang, aturan, atau kekuasaan. Misalnya, Max Weber (1864-1920) salah seorang sarjana sosial yang sangat berpengaruh, berpendapat bahwa suatu asosiasi harus disebut bersifat politik “jika dan sejauh pelaksanaan aturan-aturannya di selenggarakan secara terus-menerus dalam suatu wilayah melalui penerapan dan ancaman kekerasan fisik oleh staf administratif”. Jadi, walaupun Weber menekankan aspek wilayah (teritorial) dari suatu asosiasi politik, sepertinya halnya Aristoteles, dia menekankan bahwa suatu hubungan kekuasaan atau pemerintah adalah salah satu dari karakteristik yang penting.⁴

Untuk mengambil contoh terakhir, Harold Lasswell, seorang sarjana politik yang terkenal, mendefinisikan “ilmu politik, sebagai suatu disiplin empiris, sebagai studi mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan dan suatu tindakan politik, seperti yang dilakukan oleh seorang di dalam perspektif kekuasaan.”⁵

³ Ernest Barker, ed., *The Politics of Aristoteles* (New York: Oxford University Press, 1962), hh.1, 110.

⁴ *The Theory of Social and Economic Organization*, terjemahan A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), hh. 145-153, 154.

⁵ Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven: Yale University Press, 1950), hh. Xiv, 240.

Gambar 2.1: Irisan-irisan pandangan Aristoteles, Weber, dan Laswell⁶

Area kesesuaian dan ketidak-sesuaian dari pendapat-pendapat Aristoteles, Weber dan Laswell mengenai sifat politik bisa dilihat dalam gambar 2.1.

1. Aristoteles, Weber dan Laswell dan hampir seluruh ahli-ahli ilmu politik sepaham bahwa hubungan politik terdapat di dalam bulatan A (sekelompok hubungan yang melibatkan kekuasaan, pemerintah dan wewenang).
2. Secara definitif Laswell menyebut segala sesuatu di dalam bulatan A sebagai bersifat politik.
3. Di lain pihak, Aristoteles dan Weber mendefinisikan “kepolitikan” sebagai sesuatu yang memerlukan tambahan satu atau lebih karakteristik seperti yang tertera dalam bulatan B dan C. Misalnya, daerah dari sesuatu bersifat politik bukanlah segala sesuatu yang terdapat di dalam bulatan A atau segala sesuatu di dalam bulatan B (secara teritorial) tetapi segala sesuatu yang terdapat di bulatan tumpang tindih (irisan) AB, yang melibatkan pemerintahan maupun wilayah.
4. Walaupun Aristoteles kurang jelas dibandingkan Weber atau Lasewll dalam masalah tersebut, pasti dia akan membatasi daerah politik secara lebih ketat misalnya terhadap hubungan-hubungan di dalam asosiasi-asosiasi yang mampu untuk berdikari (mandiri) yaitu C. Karena itu bagi Aristoteles “*politics*” hanya terdapat dalam area ABC.

⁶ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Edisi Ketiga (Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1978).

Nyatalah bahwa segala sesuatu yang disebut bersifat politik oleh Aristoteles dan Weber, disebut demikian juga oleh Laswell. Tetapi, Laswell juga menganggap bersifat politik segala sesuatu yang mungkin dianggap tidak bersifat politik oleh Weber dan Aristoteles: firma perdagangan atau serikat buruh misalnya, akan mempunyai aspek-aspek politik. Sebab itu secara berani kita mendefinisikan sesuatu sistem politik sebagai suatu pola hubungan terus-menerus yang melibatkan, sampai di tingkat yang penting, pengawasan, pengaruh, kekuasaan, atau kewenangan.⁷

B. Luasnya Arti Politik

Tidak dapat disangkal bahwa definisi di atas adalah sangat luas. Sebenarnya, hal itu berarti bahwa banyak asosiasi yang oleh kebanyakan orang biasa dianggap sebagai bersifat politik, ternyata memiliki sistem-sistem kepolitikan: klub-klub pribadi, firma-firma perdagangan (PT, CV) , serikat buruh, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial suku-suku primitif, clan, bahkan mungkin keluarga-keluarga. Tiga pertimbangan mungkin dapat membantu menjelaskan pemikiran yang tidak biasa tersebut bahwa hampir semua asosiasi kemasyarakatan mempunyai suatu aspek politik:

1. Dalam bahasa biasa kita mengatakan “pemerintahan” dari suatu klub, firma atau *corporate* dan sebagainya. Malahan, kita mungkin melukiskan “pemerintahan” itu sebagai diktatorial, demokratis, perwakilan atau otoriter; dan kita sering mendengar mengenai “politik” dan “permainan politik (*politicking*)” berlangsung di dalam asosiasi-asosiasi (lembaga) ini.
2. Suatu sistem politik bukan hanya satu aspek dari sebuah asosiasi. Bilamana kita mengatakan bahwa seseorang adalah dokter, atau guru, atau petani, kita tidak dapat berasumsi bahwa dia hanyalah seorang dokter, atau hanya seorang guru, hanya seorang petani. Tidak ada asosiasi kemanusiaan yang secara eksklusif bersifat politik di dalam semua aspeknya. Seseorang mempunyai banyak hubungan lain selain daripada hubungan kekuasaan dan wewenang, misalnya cinta, penghargaan, dedikasi, kepercayaan, keyakinan, kebencian, dendam dan sebagainya.
3. Definisi kita sebenarnya tidak menyebut sedikitpun mengenai motif-motif kemanusiaan. Dengan definisi itu tidak berarti bahwa di dalam setiap sistem politik orang dipaksa oleh kebutuhan yang timbul dari dirinya sendiri untuk memerintah orang lain, bahwa pemimpin secara bernaftsu menginginkan kekuasaan, atau bahwa politik secara inheren merupakan perebutan kekuasaan yang sengit. Hubungan kekuasaan

⁷ Dalam bab III, kata-kata seperti pengawasan, kekuasaan, pengaruh, dan wewenang disebut *Influence term*. Konsep pengaruh di definisikan dalam bab tersebut.

bahkan dapat terjadi di antara orang yang tidak bernaflu atas kekuasaan, atau di dalam situasi dimana orang-orang yang sebagian besar haus kekuasaan mempunyai kesempatan sedikit untuk mendapatkannya. Kaum Indian Zuni di Amerika Barat Daya dilaporkan mempunyai perasaan kuat bahwa mencari kekuasaan adalah haram dan pencari kekuasaan tidak harus diberi kekuasaan.⁸ Jadi ketua organisasi adalah mereka yang paling tidak cocok untuk pekerjaan itu, sedangkan yang paling sesuai adalah mereka yang paling sedikit menginginkan pekerjaan tersebut. Hal yang senada juga berdasarkan hadist Rasulullah:

“ Dari Abu Musa r.a, katanya: “Aku datang menemui Nabi bersama-sama dua orang laki-laki anak pamanku. Yang seorang berkata, “ya, Rasulullah! Angkatlah aku jadi Amir (pejabat) di salah satu daerah yang telah dikuasakan Allah kepada Anda.” Dan yang seorang lagi berkata pula seperti itu. Jawab Rasulullah saw., “Demi Allah! Aku tidak akan mengangkat seseorang untuk memangku suatu jabatan, orang yang meminta-minta supaya dia diangkat, bahkan tidak pula orang yang mengharap-harap (berambisi) untuk itu,”⁹

Tetapi apapun bukti dari antropologi atau informasi dari hadist tersebut mungkin yang menjadi masalah pokok adalah: definisi kita yang sangat luas mengenai sistem politik praktis tidak membuat asumsi mengenai sifat dari motif-motif kemanusiaan. Memasuki sistem politik atau gelanggang politik akhirnya seringkali mengesampingkan masalah kemanusiaan dan juga bahkan keimanan. Kekuasaan diburu untuk sekedar memenuhi hawa nafsu bukan karena hati nurani yang bersandarkan kekuasaan adalah amanat Tuhan. Tanda-tanda itupun kalau kita mau menyadari sebenarnya sudah ada sejak manusia lahir dengan simbol tangan yang dikepal dan tangisan seakan suatu pesan (kekuasaan) yang dikirim ke siapapun disekitarnya agar diikuti keinginannya. Pemegang kekuasaan haruslah berawal dari niat yang bersih karena ingin melakukan pengabdian bukan berdasarkan ambisi semata. Sekalipun luas, definisi itu membantu kita untuk membuat beberapa pembedaan tegas yang sering kali kabur di dalam diskursus pada umumnya.

⁸ Ruth Benedict, *Patterns of Culture* (Boston: Houston Mifflin Co., 1934)

⁹ Shahih Muslim No.: 1791

3. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dimana kebanyakan kegiatan perekonomian yang besar dilakukan oleh swasta.
4. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian dimana kebanyakan kegiatan yang besar dilakukan oleh agensi-agensi yang dimiliki pemerintah atau masyarakat.

Tiap-tiap pasang dari istilah tersebut, demokrasi-kediktatoran, kapitalisme-sosialisme, menyatakan secara tidak langsung adanya perbedaan (*dichotomy*), dan perbedaan-perbedaan sering kali kurang memuaskan. Dalam kenyatannya, banyak sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis atau diktatorial; di dalam banyak negara berbagai kegiatan dari swasta dan pemerintah bergabung satu sama lain. Gabungan-gabungan ini tidak hanya menjelaskan mengenai kelemahan dari dikotomi “kapitalisme-sosialisme”, tetapi juga menekankan pada fakta bahwa dari sistem ekonomi untuk tujuan-tujuan tertentu dan sebagai bagian dari sistem politik untuk tujuan-tujuan yang lain. Perlu diingat adalah bahwa pencampur-bauran istilah-istilah tersebut setelah berguna secara intelektual untuk membedakan beberapa aspek kehidupan seperti “perekonomian” dan aspek-aspek lainnya seperti “politik”.

Menurut Rusadi¹⁰ pengertian sistem adalah: kesatuan (*unity*) yang terdiri dari bagian-bagian (*parts, components, elements, secondary-systems, subsystems*) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan super-ordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi bisa dikatakan sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berhubungan satu sama lain melalui beberapa cara, misalnya: sistem tata surya, tim sepak bola, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, partai Politik. Selanjutnya Ludwig Von Bertalanffy dalam bukunya “*General System Theory*” atau teori umum sistem yang memaparkan sistem mencakup sifat-sifat konseptual dari berbagai disiplin ilmu. Adapun ciri-ciri dari *General System Theory* adalah:¹¹

1. Interdependensi (saling ketergantungan);
2. *Holism* (satu kesatuan yang utuh);
3. Mencari tujuan (*goal seeking*);
4. Adanya *input – proses – output*;
5. Adanya kemungkinan entropi (penurunan atau pengurangan sumber daya karena diperlukan untuk melakukan proses);
6. Adanya unsur regulasi (pengaturan);
7. Kegiatan transformasi (perubahan);
8. Adanya hierarki (tingkatan);
9. Munculnya gejala diferensiasi; dan

¹⁰ Dalam Dr.H. Nasuka, *Teori Sistem* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 17

¹¹ Ibid, hlm 16

10. Adanya unsur *equifinality* (kesamaan mencapai tujuan akhir).

Di dalam buku pertama yang terbit tahun 1953 (*The Political System*) Easton mengajukan argumentasi seputar perlunya membangun satu teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap. Teori tersebut harus mampu mensistematisasikan fakta-fakta kegiatan politik yang tercerai-berai ke dalam suatu penjelasan yang runtut dan tertata rapi. Ronald H. Chilcote menyatakan bahwa pemikiran Easton dapat di rujuk pada tiga tulisannya yaitu *The Political System*, *A Framework for Political Analysis*, dan *A System Analysis of Political Life*.¹² Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Kata secara otoritatif membuat konsep sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara.¹³ Atas definisi Easton ini Michael Saward menyatakan adanya konsekuensi-konsekuensi logis berikut:¹⁴

1. Bagi Easton hanya ada satu otoritas yaitu otoritas negara;
2. Peran dalam mekanisme output (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas;
3. Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, dan sebab itu: (a) keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi dan (b) Legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari *chaos* politik; dan
4. Bagi Easton sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara *legitimate*.

Menurut Chilcote, dalam tulisannya di *The Political System*, Easton mengembangkan empat asumsi (anggapan dasar) mengenai perlunya suatu teori umum (*grand theory*) sebagai cara menjelaskan kinerja sistem politik, dan Chilcote menyebutkan terdiri atas:¹⁵

1. Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
2. Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
3. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis),

¹² Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981) hlm. 145-82.

¹³ Michael Saward, *The Wider Canvas: Representation and Democracy in State and Society* dalam Sonia Alonso, John Keane, and Wolfgang Merkel, eds., *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2011) hlm.80.

¹⁴ Ibid., hlm. 80-83.

¹⁵ Ronald H. Chilcote, *Theories ...*, op.cit., hlm.146.

masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

4. Integrasi dalam sistem

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan media massa.

Hasil pemikiran **tahap pertama** Easton adalah sebagai berikut:¹⁷

Gambar 2.2: Skema Kerja Sistem Politik Easton

Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Input adalah pemberi makan sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan

¹⁷ Skema diambil dari Ronald H. Chilcote, *Theories ...*, op.cit., hlm.147.

2. Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan *extrasocietal* terdiri atas:
 - a) Sistem Sosial Internasional. Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya, atau mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi *International Regime* (rezim internasional) yang sangat banyak variannya.
 - b) Sistem ekologi internasional. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti *global warming* atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia.
 - c) Sistem politik internasional. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.

Seluruh pikiran Easton mengenai pengaruh lingkungan ini dapat dilihat di dalam bagan model arus sistem politik berikut:

Gambar 2.3: Reproduksi Model Arus Sistem Politik Easton

Model arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan, baik *intrasocietal* maupun *extrasocietal*, mampu mempengaruhi tuntutan dan

dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. Terlihat dengan jelas bahwa skema ini merupakan kembangan lebih rumit dan rinci dari skema yang dibuat Easton dalam karyanya tahun 1953. Keunggulan dari model arus sistem politik ini adalah Easton lebih merinci pada sistem politik pada hakikatnya bersifat terbutka.

Dua jenis lingkungan yang terdiri dari komponen *intrasocietal* dan *extrasocietal* mampu mempengaruhi sampai tahap mekanisme *input* (tuntutan dan dukungan) sehingga struktur proses dan output harus lincah dalam mengadaptasinya. Tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh Otoritas. Otoritas di sini berarti lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk *policy* (kebijakan), bukan sembarang lembaga, melainkan menurut Easton diposisikan oleh negara (state). *Output* ini kemudian kembali dipersepsi oleh lingkungan dan proses siklus kembali berlangsung.

Gabriel Abraham Almond adalah salah satu pengguna teori sistem politik Easton. Namun, Almond kurang sreg dengan pendekatan Easton yang terlampau abstrak. Almond juga menyayangkan kurangnya perhatian Easton pada kajian-kajian politik dalam skala mikro. Menurut Chilcote, pada tahun 1956 – jadi sekitar tiga tahun setelah David Easton meluncurkan karyanya *The Political System* tahun 1953 - Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode *trial and error* layaknya sebuah teori. Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton. Jika Easton membangun suatu *grand theory*, maka Almond membangun suatu *middle-range theory*. Secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap. Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat Ronald H. Chilcote yang mengacu pada karya-karya penelitian Almond.²⁰

Di dalam tulisannya *Comparative Polititcal System* tahun 1956 Almond mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik yang terdiri atas:

1. Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah;
2. Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya; dan
3. Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.

Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal. Dapat dibayangkan

²⁰ Ibid. hlm. 145-50.

pengaruh politik struktur-struktur non formal yang dipimpin oleh Kardinal Sin sewaktu perubahan politik Filipina, Uskup Bello saat Timor Timur masih berada di wilayah Indonesia, M. Amien Rais dan K. H. Abdurrahman Wahid yang mewakili Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik Indonesia, ataupun pengaruh Pakubuwana secara spiritual bagi politik di tanah Jawa. Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini sementara Almond justru mengapresiasi signifikansinya. Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*.

Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di masa pra transisi politik 1998 berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi. Kecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik – atau biasa disebut budaya politik – juga berbeda baik antar negara atau bahkan di dalam negara itu sendiri. Almond bersama Sidney Verba secara khusus menyelidiki budaya politik ini yang tersusun di dalam buku *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* yang terbit tahun 1963. Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan luas digunakan para peneliti di dunia termasuk Indonesia.

Khusus mengenai budaya politik, Almond menyatakan bahwa yang ia maksud dengannya adalah:²¹

1. Seperangkat orientasi politik yang bersifat subyektif dan berlaku di suatu bangsa, atau sub-sub masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut;
2. Budaya politik terdiri atas komponen-komponen kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik), afektif (rasa penghargaan atas politik), dan evaluatif (komitmen atas nilai-nilai politik);
3. Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak, pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa dewasa sehubungan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan pemerintah; dan
4. Budaya politik berdampak atas struktur dan kinerja pemerintah, di mana dampak ini sifatnya lebih cenderung memaksa ketimbang otomatis menentukan struktur dan kinerja pemerintah.

Budaya politik di masing-masing individu sifatnya subyektif. Subyektivitas ini mendorong terdapatnya lebih dari satu macam budaya politik di dalam masyarakat suatu bangsa. Layaknya budaya yang bersifat sosial (budaya daerah atau lokal), budaya politik masyarakat dalam satu negara sangat mungkin berbeda. Sebagian warganegara Indonesia di propinsi

²¹ Gabriel A. Almond, *The Study of Political Culture dalam Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski, eds., Political Culture in Germany* (New York: St. Martin's Press, Inc., 1993) hlm.15.

Papua tidak seluruhnya memiliki afeksi atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya pada sistem politik lokal yaitu suku-suku atau klan di mana mereka menjadi anggota (komunitas politik lokal), pendukung Organisasi Papua Merdeka ataupun pro-integrasi.

Kembali pada masalah perkembangan pemikiran Gabriel Abraham Almond, bahwa dalam tahap selanjutnya, Almond – kini bersama James Coleman di dalam bukunya *The Political of the Developing Areas* yang terbit tahun 1963 – berusaha menghindari terjebaknya analisa sistem politik hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal. Almond dan Coleman kemudian mengarahkannya pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit politik dalam sistem politik. Dengan demikian, Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan konsep *power*, sementara konsep struktur digunakannya untuk mengganti konsep lembaga politik formal.

Almond dalam bukunya *“The Study of Political Culture”* menegaskan bahwa sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. Keempat karakteristik ini berlaku di negara manapun dan terdiri atas premis-premis:²²

1. Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik;
2. Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik;
3. Setiap struktur politik bersifat multifungsi; dan
4. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warganegara masing-masing).

Setelah mengajukan keempat premis tersebut, Almond memodifikasi struktur *input* serta *output* Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil memperjelas abstraknya Easton dalam bentuk yang lebih mendetail dalam menjelaskan masalah fungsi *input* dan *output* sistem politik sebagai berikut:²³

1. Fungsi *Input* terdiri atas:

- a) Sosialisasi dan rekrutmen politik. Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik. Sosialisasi kebanyakan dilakukan oleh partai politik dan lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b) Artikulasi kepentingan. Struktur yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) *Institutional*; (b) *Non-Associational*; (c) *Anomic*; dan (d) *Associational*.

²² Ronald H. Chilcote, *Theories ...*, op.cit., hlm. 163.

²³ Jagdish Chandra Johari, *Comparative Politics*, 8th Edition (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008) hlm. 75-7.

- c) Agregasi (pengelompokan) kepentingan. Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif. Sistem kepartaian (menurut Almond) misalnya *Authoritarian*, *Dominant-Authoritarian*, *Competitif*, dan *Competitive Multi-party*. Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolut, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik. Pengelompokan contohnya pada saat terbentuknya kelompok Poros Tengah di DPR RI (1999) dan dua koalisi yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada 2014.
- d) Komunikasi politik. Guna membanding pola komunitas politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (1) Homogenitas informasi politik yang tersedia; (2) Mobilitas informasi (vertikal atau horisontal); (3) Nilai informasi; dan (4) Arah dari arus informasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).

2. Fungsi *output* terdiri atas :

- a) Pembuatan peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (*policy*).
- b) Penerapan peraturan. Ketika *policy* sudah terbentuk, hal yang harus dilakukan adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik.
- c) Pengawasan peraturan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

Menurut Chilcote, setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton, Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut:²⁴

²⁴ Ronald H. Chilcote, *Theories ...*, op.cit., h. 167

Gambar 2.4 Diagram Sistem Politik Almond dan Level-level Fungsi (modifikasi)

Di level fungsi *input*, sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik, birokrasi, lembaga yudisial, dan sebagainya. Dalam perkembangan pemikirannya kemudian, Almond memasukkan sosialisasi dan rekrutmen politik ke dalam fungsi konversi. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan dan tuntutan politik untuk melakukan tindakan.

Melalui skema di atas – masih menurut Chilcote – Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level. Level pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu:

1. Artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan);
2. Agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang);
3. Komunikasi politik; (penyampaian pesan dari sumber ke penerima dalam konteks politik);
4. pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat);
5. Pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan;
6. Pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara).

Dari level-level yang telah di paparkan diatas terdapat adanya fungsi nomor satu hingga tiga yang berhubungan dengan tuntutan dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor empat hingga enam

berada di sisi keluaran berupa keputusan serta tindakan. Mengenai penjelasan atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang dimaksud Almond, Jagdish Chandra Johari memetakannya ke dalam tiga arus penjelasan yaitu *input*, konversi, dan *output*.²⁵

3. Tuntutan dan Dukungan

Tuntutan adalah bahan mentah (*raw material*) yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. Tuntutan adalah berada di struktur *input* dan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik. Tuntutan juga sifatnya sangat beragam dan setiap tuntutan punya dampak yang berbeda atas sistem politik. Tuntutan akan menjadi masukan bisa jadi suatu desakan yang berasal dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*, yang variannya sebagai:²⁶

- a) Tuntutan atas komoditas dan pelayanan, misalnya jaminan sosial, kelancaran bertransportasi, kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan saluran irigasi, ataupun pelayanan birokrasi negara yang tidak berbelit. Konversi atas tuntutan ini adalah dalam bentuk artikulasi kepentingan (atau tuntutan). *Output* berlingkup pada kemampuan ekstraktif semisal pengenaan pajak untuk membiayai jaminan sosial, peningkatan retribusi kendaraan untuk membangun jalan-jalan layang, penaikan pajak perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengundangan investor asing untuk membangun saluran irigasi, dan peningkatan hutang negara untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b) Tuntutan untuk mengatur sejumlah perilaku warganegara seperti penertiban ormas-ormas parayudisial, pembersihan tindak korupsi pejabat negara, atau kompilasi hukum Islam ke dalam hukum publik. *Output* berupa kemampuan regulatif yang mengatur perilaku individu, kelompok, ataupun warganegara secara keseluruhan. Konversi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang-undang (agregasi).
- c) Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menjalin kontak dengan pejabat-pejabat publik. Konversi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi peraturan yang lebih otoritatif. *Output* konversi misalnya kemampuan regulatif misalnya penetapan kuota caleg 30% perempuan dalam undang-undang pemilihan umum.

²⁵ J.C. Johari, *Comparative ...*, op.cit. p. 122-3. Penulis ini memuatnya ke dalam tabel, dan di buku ini diparafrase menjadi paragraf dengan tambahan seperlunya.

²⁶ Ibid.

- d) Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara-upacara hari besar nasional. Konversi atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. *Output* yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.

Jika tuntutan adalah bahan mentah untuk memproduksi keputusan-keputusan politik, maka dukungan berkisar upaya mempertahankan atau menolak keberlakuan sebuah sistem politik. Tanpa dukungan sistem politik kehilangan legitimasi dan otoritasnya. Selanjutnya dukungan tersebut terdiri atas:²⁷

- a) Dukungan material warganegara bisa berupa kemauan membayar pajak atau peran aktif mereka dalam program-program yang dicanangkan pemerintah (misalnya program kebersihan lingkungan, penanaman sejuta pohon). Konversi dukungan ini adalah adjudikasi peraturan di tingkat individu yaitu upaya penerapan sanksi bagi yang tidak menurut pada program pemerintah serta kemampuan simbolik pemerintah untuk melakukan himbauan agar publik tertarik memberi dukungan pada pemerintah.
- b) Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Konversi dukungan ini berupa pentransmisian informasi yang berkaitan dengan ketaatan warganegara pada hukum di sekujur struktur sistem politik, antar sistem politik, serta lingkungan *extrasocietal*-nya.
- c) Dukungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi politik, ataupun mengadakan diskusi tentang politik.
- d) Dukungan dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbol-simbol negara. Misalnya mengamalkan Pancasila, menyayangi sarana-sarana publik (alat transportasi umum, telepon umum, gedung-gedung pemerintah), menentang penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan hujan asam, mensosialisasikan peran vital Pancasila dalam mengikat integrasi nasional Indonesia.

4. Kapabilitas Sistem Politik

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsi-fungsi kemampuan. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas

²⁷ Ibid.

Suharto dengan gaya kepemimpinan yang sering disebut *“The Smiling General”* terkenal dengan sebutan bapak Pembangunan.

- e) **Kemampuan responsif** adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini *output*. Di Indonesia tuntutan yang sangat bersejarah adalah pada saat tuntutan rakyat ingin Presiden Suharto turun jabatan, setelah 32 tahun berkuasa bukan hal yang sederhana. Merespon gerakan massa yang dikomandoi oleh elemen-elemen mahasiswa, aktifis dan beberapa tokoh nasional tersebut akhirnya berujung mundurnya Suharto sebagai bentuk sinkronisasi dari tuntutan rakyat pada saat itu. Lalu pada masa pemerintahan SBY juga mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan Helsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap. Kemampuan responsif juga ditunjukkan pada era pemerintahan Jokowi, terutama terhadap opini publik, baik di media massa dan media sosial yang memanas terhadap isu tertentu. Seperti tuntutan penurunan harga BBM yang mengakibatkan terjadi 4 kali perubahan sejak menjabat presiden, begitu pula pada kasus pencabutan izin ojek *online* oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan langsung direspon melalui *twitter* oleh Jokowi dengan twitnya, *“Saya segera memanggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata. JKW”*.²⁹ Di era digital, opini publik bisa dipantau dan diamati di sosial media dengan istilah *netizen* sehingga dapat dengan cepat diamati dan direspon oleh elite politik.

Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, *output* dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter, *output* yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.

5. Pemeliharaan Sistem Politik

Level ketiga ditempati oleh fungsi *maintenance* (pemeliharaan) dan adaptasi. Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. Melalui

²⁹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/18/jokowi-merespon-ojek-online-netizen-kritik-menteri-panggil-dan-setrap-pak>, diakses tanggal 26 April 2016, jam 06.28

Apakah yang disebut masyarakat demokratis? Masyarakat bebas? Suatu masyarakat sosial? Suatu masyarakat otoriter suatu masyarakat internasional? Dengan cara bagaimana suatu sistem social dibedakan dari suatu sistem politik?

Pertanyaan-pertanyaan diatas sukar untuk dijawab terutama karena istilah “masyarakat” dan “sistem sosial” digunakan secara longgar bahkan juga oleh ahli-ahli bidang ilmu sosial. Secara umum istilah “masyarakat” cenderung menjadi inklusif; hubungan ekonomi dan politik merupakan jenis hubungan sosial yang khas. Walaupun “sistem social” kadang-kadang memberikan pengertian yang lebih khusus, hal ini juga merupakan konsep yang sangat luas. Talcott Parsons, seorang ahli sosiologi Amerika mendefinisikan suatu sistem sosial dengan tiga karakteristik:

1. Terdapat dua atau lebih orang yang berinteraksi;
2. Di dalam tindakan-tindakan mereka, mereka juga memperhatikan bagaimana yang lain bertindak;
3. Kadang-kadang mereka bertindak dalam rangka mengejar tujuan bersama.

Jadi, suatu sistem sosial merupakan suatu jenis orde yang sangat inklusif.

Gambar 2.4: Sistem-sistem politik dan ekonomi dalam Sistem Sosial

Menurut Parsons suatu sistem politik atau sistem ekonomi merupakan bagian-bagian, aspek-aspek, atau sub-sistem-subsistem dari suatu sistem sosial. Cara memandang masalah ini digambarkan dalam gambar 2.4, dimana AC menggambarkan kumpulan dari seluruh sub-sistem politik dan ABC menggambarkan subsistem – subsistem yang dapat dianggap sebagai

subsistem ekonomi atau politik tergantung kepada aspek mana yang lebih kita pentingkan. Contoh mengenai ABC seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masalah PT. Freeport, masalah inflansi, kenaikan harga BBM dan sebagainya yang merupakan persinggungan masalah politik dan ekonomi yang akan mempengaruhi sistem sosial di masyarakat, sebagai contoh kegaduhan politik parlemen (DPR) seperti kasus “papa minta saham” (2015), kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan (output) dari salah satu sistem politik berakibat reaksi dari masyarakat seperti demonstrasi dan banjir opini di media sosial seperti *hashtag* (tanda pagar: #) yang menjadi *trending topic* dan ini adalah fenomena yang menjadi perhatian dari kekuatan-kekuatan politik suprastruktur saat ini.

Jadi, suatu masyarakat demokratis dapat di definisikan sebagai suatu sistem sosial yang tidak hanya mempunyai (sub) sistem politik demokratis tetapi juga sejumlah sub-sistem lain yang bekerja untuk menyumbangkan sesuatu yang memperkuat proses politik demokratis secara langsung atau tidak langsung. Sebaliknya, penting suatu masyarakat otoriter menurut definisinya, akan berisikan banyak sub-sistem seperti keluarga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, dan lainnya yang kesemuanya bertindak untuk memperkuat proses politik otoriter. Sebagai contoh dibawah ini:

- Di dalam bukunya yang terkenal, “*Democracy in Amerika*” (1835-1840), penulis Prancis Alexis de Tocqueville menyajikan daftar mengenai sejumlah “sebab-sebab pokok yang menimbulkan kecenderungan untuk melanggengkan republik yang demokratis di Amerika serikat”. Daftarnya tidak hanya meliputi struktur konstitusional tetapi juga mengenai tidak adanya organisasi kemiliteran yang besar dan kuat, persamaan dalam kondisi sosial dan ekonomi, perekonomian pertanian yang makmur, dan kebiasaan, adat istiadat serta kepercayaan agama orang-orang Amerika.³¹ Dalam pandangan Tocqueville prospek-prospek dari suatu sistem politik demokrasi yang sehat di Amerika Serikat sangat diperkuat oleh kenyataan bahwa suatu konstitusi yang sangat demokratis telah diperkuat oleh banyak aspek kemasyarakatan yang lain. Sebab itu, masyarakat Amerika dapat di sebut sebagai suatu masyarakat demokratis.
- Sebaliknya, banyak pengamat merasa pesimis mengenai masa depan demokrasi di Jerman setelah perang dunia II, karena mereka yakin bahwa banyak aspek dalam masyarakat Jerman yang sangat otoriter dan cenderung untuk merusak hubungan-hubungan politik yang demokratis. Mereka terutama memberi perhatian kepada kecenderungan yang meluas di dalam semua jenis lembaga kemasyarakatan untuk menganut suatu pola dominasi dan kepatuhan yang kuat seperti dalam keluarga, sekolah-sekolah, gereja-gereja, perdagangan, dan semua hubungan antara pegawai tinggi pemerintahan baik polisi atau pegawai

³¹ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Vol.1 (New York: Vintage Books, 1955), hlm. 292-342.

negeri dengan rakyat biasa. Kenyataan bahwa demokrasi politik juga terdapat di dalam suatu lingkungan kemasyarakatan yang otoriter tidaklah menguntungkan bagi masa depan demokrasi di Jerman. Sejumlah pengamat masa kini merasa lebih optimis mengenai masa depan demokrasi politik di Jerman karena mereka melihat bukti bahwa sifat otoriter di dalam beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya telah bekurang.

F. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik

Dalam wilayah ilmu terapan (*das sein*), komunikasi politik sangat bergantung pada sistem politik tempat komunikasi diterapkan. Secara universal sistem politik menampilkan karakter sama yaitu terdiri dari dua sub-sistem, yaitu:³²

1. Sub-sistem suprastruktur (*the governmental political sphere*), sebagai sarana kehidupan politik pemerintah, dan
2. Sub-sistem infrastruktur yaitu suasana kehidupan politik masyarakat (*the socio political spare*).

Kedua kondisi tersebut, saling berpengaruh secara berkaitan, sehingga suprastruktur sebagai cerminan dari infrastruktur, bahkan suprastruktur harus mengakomodasikan kehidupan infrastruktur, dan sebaliknya infrastruktur sebagai replika dari suprastruktur. Menurut Robert Dahl dalam buku "*Modern Political Analysis*", sistem politik adalah:

"any persistent pattern of human relationship that involved to a significant of extent power, influence, control, rule or authority."

Sistem politik menurut Dahl, sebagai pola tetap hubungan manusia yang terkait berbagai kepentingan tentang kekuasaan, pengaruh, pengendalian, aturan dan wewenang. Dari ungkapan ini, perlu dipahami tentang pola tetap, yaitu suatu pola yang telah baku dan telah menjadi standar atau ukuran dalam kehidupan negara. Pola tetap mengandung makna pula sebagai pola yang mendasar pada sistem nilai tertentu yang berlaku pada sistem tertentu pula.

Demikian halnya komunikasi politik apabila sebagai suatu sistem maka komunikasi tersebut berada pada sistem tertentu. Secara empiris, sistem komunikasi terpilah ke dalam empat sistem besar, yaitu:³³

1. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem totaliter (*authoritarianism system*).
2. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem liberal (*libertarian system*).
3. Komunikasi politik yang diaktualisasikan pada negara penganut sistem tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

³² Soemarno AP, Komunikasi Politik, (Universitas Terbuka: 2009), hlm. 1.21

³³ Ibid, hlm 1.22

Daftar Pustaka

- Achmad, Mudlor. (tanpa tahun). *Etika Dalam Islam*. Surabaya: Al-ikhlas.
- Adji, Oemar Seno. 1973. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1974. *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Ghazali, Imam. 1995. *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Almond, Gabriel dan James S. Coleman [Eds.]. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton University Press.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alonso, Sonia. 2011. *The Future of Representative Democracy*. Cambridge University Press.
- Arifin, Anwar. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta: Media Sejahtera.
- _____. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bahm, Archie J. 2003. *Filsafat Perbandingan: Filsafat Barat, India, Cina dalam Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bambang S. dan Sugianto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Penerbit Grahadi.
- Barker, Ernest. 1962. *The Politics of Aristotle*. Oxford University Press.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Benedict, Ruth. 2006. *Patterns of Culture*. Mariner Books.
- Berg-Schlosser, Dirk dan Ralf Rytlewski [Eds.]. 1993. *Political Culture in Germany*. Palgrave Macmillan.
- Bertalanffy, Ludwig Von. 2003. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller Inc.
- Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Blake, Reed H. dan Edwin O. Haroldsen. 2003. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Terjemahan oleh Hasan Bahanan. Surabaya: Papyrus.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chilcote, Ronald H. 1981. *Theories of Comparative Political Economy*. Westview Press.
- Dahl, Robert A. dan Bruce. 2002. *Modern Political Analysis*. Pearson.

-

- _____. 1993. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makmurtono, Agus dan Munawir. 1989. *Etika (Filsafat Moral)*. Jakarta: Wira Sari.
- Manheim, Karl. 1987. *Sosiologi Sistematis: Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Masdar, Umaruddin [et al.]. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta; LKiS.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication (Communication and Society)*. Routledge.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi Dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasuka. 2005. *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Zulkarimien. 1990. *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Terjemahan oleh Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Muslim [et al.]. 1995. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nurudin. 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pasiak, Taufiq. 2004. *Revolusi IQ/EQ/SQ: Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Quran dan Teori Neurosains Mutakhir*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Patterson, Kerry dan Joseph Grenny. 2005. *Crucial Conversations - Strategi Menghadapi Percakapan Berisiko Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter, Laurence J. 1986. *Piramida Peter: atau Mungkinkah kita Mencapai Puncaknya*. Jakarta: Erlangga.
- Plano, Jack C., Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. 1989. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Purwasito, Andrik. 2011. *Pengantar Studi Politik*. Surakarta: UNS Press.
- R. G. Meadow. 1985. Political Communication Research in the 1980s. *Journal of Communication*. Volume 35 Issue 1.
- Ranney, Austin. 1992. *Governing: An Introduction to Political Science*. Prentice Hall College.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun [Eds.]. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Reksosusilo, Stanislaus. 2005. *Diktat Kuliah Filsafat Cina*. Malang: STFT Widya Sasana.

- Rogers, Everett M. 2004. 'Theoretical Diversity in Political Communication'. In Lynda Lee Kaid (Ed.), *Handbook of Political Communication Research*. Routledge.
- Rosenthal, Erwin Isak Jakob. 2009. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*. Cambridge University Press.
- Ruck, Anne. 2008. *Sejarah Gereja Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 2002. *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Sastropetro, Santoso. 1990. *Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shahreza, Mirza. 2017. Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi. *Journal of Communication (Nyimak)*, Vol. 1, No. 1, 33-48.
- Shahreza, Mirza dan Korry El-Yana. 2016. *Etika Komunikasi Politik*. Tangerang: Indigomedia.
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Soemarno dan Rochajat Harun. 2006. *Komunikasi Politik: Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemarno. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Materi Pokok Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2007. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Strauss, William dan Neil Howe. 1991. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. William Morrow & Co.
- _____. 1993. *13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail?* Vintage.
- _____. 2000. *Millennials Rising: The Next Great Generation*. Vintage.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Suito, Deny. 2006. *Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Centre For Moderate Muslim Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susanto, Astrid, S. 1985. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Suwardi, Arsono [et al.]. 2002. *Politik, Demokrasi & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Syah, Sirikit. 2014. *Membincang Pers: Kepala Negara dan Etika Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thompson, George Carslake. 2012. *Public Opinion and Lord Beaconsfield (Volume 1)*. Ulan Press.
- Tocqueville, Alexis de. 1990. *Democracy in America, Volume 1*. Vintage.
- Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss. 2001. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi (Buku 1)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umary, Barnawie. 1993. *Materia Akhlak*. Solo: Ramadhani.
- Varma, SP. 1995. *Teori Politik Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Weber, Max [et al.]. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wibowo, Eddi [et al.]. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wiseman, H. Victor. 1966. *Political Systems : Some Sociological Approaches*. Praeger.
- Young, Oran R. 1968. *Systems of Political Science (Foundations of Modern Political Science Series)*. Prentice-Hall.
- Yu-Lan, Fung. 2007. *Sejarah Filsafat Cina*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tentang penulis

Mirza Shahreza, S.I.Kom, M.I.K. Lahir di Jakarta, 29 Juli 1976. Bertempat tinggal domisili di daerah Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka (UT) pada tahun 2012 dan S2 Komunikasi Politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada tahun 2014. Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Pengalaman mengajar pernah mengampu mata kuliah komunikasi politik, Komunikasi massa, komunikasi antar budaya dan Teori Komunikasi pada Universitas Muhammadiyah Tangerang (2014 – sekarang) dan FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) (2012-2015). Saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana S3 Komunikasi Pembangunan Pedesaan dan Pertanian di Institut Pertanian Bogor angkatan 2017.

Keterlibatan dalam organisasi menjadi pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat sebagai wakil ketua bidang keanggotaan periode 2013 – 2017, sebagai ketua dewan Pembina Yayasan Desa Hijau (YDH) sejak 2011 – sekarang, dan kordinator *Association of The Creator's Code Breakers (ACCB)* sejak 2009 – sekarang.